



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 49 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

24. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2793/XII/Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
25. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otomoni seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja .

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.170.671.349.000,00 (*Satu triliun seratus tujuh puluh milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp125.500.000.000,00 (*Seratus dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.250.000.000,00 (*Enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*Enam belas milyar rupiah*);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (*Sembilan milyar rupiah*);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp84.250.000.000,00 (*Delapan puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp16.250.000.000,00 (*Enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*Enam ratus juta rupiah*);
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (*Satu milyar delapan ratus juta rupiah*);
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (*Satu milyar tiga ratus juta rupiah*);
- (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.750.000.000,00 (*Lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (*Satu milyar enam ratus juta rupiah*);
- (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus juta rupiah*);
- (8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (*Satu milyar sembilan ratus juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000 (*Enam belas milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.200.000.000,00 (*Dua milyar dua ratus juta rupiah*);
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.650.000.000,00 (*Dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*);
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (*Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp84.250.000.000,00 (*Delapan puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. Pendapatan BLUD; dan
 - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga milyar rupiah*);
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga milyar rupiah*);

- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.250.000.000,00 (*Tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat milyar rupiah*);
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp55.000.000.000,00 (*Lima puluh lima milyar rupiah*);
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*Enam belas milyar rupiah*).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.010.206.349.000,00 (*Satu triliun sepuluh milyar dua ratus enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp949.137.977.000,00 (*Sembilan ratus empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik;
 - d. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik; dan
 - e. Dana desa.
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp15.471.131.000,00 (*Lima belas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

- (4) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp537.324.447.000,00 (*Lima ratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp122.190.211.000,00 (*Seratus dua puluh dua milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah*);
- (6) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp163.242.048.000,00 (*Seratus enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah*);
- (7) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp110.910.140.000,00 (*Seratus sepuluh milyar sembilan ratus sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.068.372.000,00 (*Enam puluh satu milyar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.000.000.000,00 (*Lima puluh tujuh milyar rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00 (*Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah*);

- (4) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (*Sembilan milyar lima ratus juta rupiah*);
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima belas milyar rupiah*);
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua milyar rupiah*);
- (7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp17.000.000.000,00 (*Tujuh belas milyar rupiah*);
- (8) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.068.372.000,00 (*Empat milyar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 10

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp34.965.000.000,00 (*Tiga puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*).

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.170.671.349.000,00 (*Satu triliun seratus tujuh puluh milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp770.936.371.903,00 (*Tujuh ratus*

tujuh puluh milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp496.809.159.174,00 (*Empat ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*);
- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp246.988.856.729,00 (*Dua ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*);
- (3) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp575.640.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*);
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.671.316.000,00 (*Dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp891.400.000,00 (*Delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp496.809.159.174,00 (*Empat ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp323.408.950.886,00 (*Tiga ratus dua puluh tiga milyar empat ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*);
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.933.206.388,00 (*Seratus dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*);
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.136.692.900,00 (*Dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*);
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.366.110.000,00 (*Tiga belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah*);
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp170.534.000,00 (*Seratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah*);
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp706.800.000,00 (*Tujuh ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah*);
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp34.086.865.000,00 (*Tiga puluh empat milyar delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Pasal 14

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp246.988.856.729,00 (*Dua ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.524.702.125,00 (*Tiga puluh dua milyar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua ribu seratus dua puluh lima rupiah*);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.025.451.400,00 (*Sembilan puluh tiga milyar dua puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah*);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.884.131.700,00 (*Sembilan milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.998.695.000,00 (*Empat puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.819.511.504,00 (*Dua milyar*

- delapan ratus sembilan belas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus empat rupiah);*
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.135.230.000,00 *(Empat puluh milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);*
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.601.135.000,00 *(Dua puluh milyar enam ratus satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).*

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp215.145.279.097,00 *(Dua ratus lima belas milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:*
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 *(Lima ratus juta rupiah);*
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.672.731.646,00 *(Empat puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);*
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.474.269.426,00 *(Tiga puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);*
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp131.351.922.225,00 *(Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);*

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.146.355.800,00 (*Satu milyar seratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (*Delapan belas milyar rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp166.589.698.000,00 (*Seratus enam puluh enam milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil pajak daerah Kabupaten kepada pemerintah Desa;
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten kepada pemerintah Desa;
 - c. Belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa; dan
 - d. Belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten kepada desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*);
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- (4) Belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.279.558.000,00 (*Lima puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah*);

- (5) Belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp110.910.140.000,00 (*Seratus sepuluh milyar sembilan ratus sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 18

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*), yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*);
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*).

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp0,00 (*Nihil*);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 23

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati Tana Toraja ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal, 30 Desember 2021


BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal, 30 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021 NOMOR 49

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125.500.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	16.250.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	600.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	600.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	600.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.800.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.500.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.500.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	200.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	200.000.000
4.1.01.07.06	Pajak Bar dan Sejenisnya	100.000.000
4.1.01.07.06.0001	Pajak Bar dan Sejenisnya	100.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.300.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	500.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	500.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	800.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	800.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	5.750.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.750.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.750.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.600.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.600.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.600.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.300.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	3.300.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.300.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.900.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.900.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.900.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	16.000.000.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.200.000.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	800.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	800.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	465.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	465.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	185.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	185.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	12.650.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	700.000.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	310.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	40.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	350.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	500.000.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	500.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	250.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	250.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	50.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	50.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	3.200.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	3.200.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.950.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.950.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.150.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.100.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.100.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	50.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	50.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.000.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.000.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.000.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	84.250.000.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.000.000.000
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	150.000.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.01.05.0003	Hasil Penjualan Hewan	150.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	2.850.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	2.850.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	3.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.991.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.991.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	6.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	6.000.000
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	3.000.000
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	3.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.250.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.250.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.250.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.000.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	4.000.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	4.000.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	55.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	55.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	55.000.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	16.000.000.000
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.000.000.000
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.000.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.010.206.349.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	949.137.977.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	838.227.837.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.471.131.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.526.740.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.181.336.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	702.666.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.101.545.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	40.018.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	537.324.447.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	537.324.447.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	122.190.211.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	402.034.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.179.982.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.930.957.000
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	445.787.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	29.186.129.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.342.175.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	12.069.067.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.347.088.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	507.216.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	1.403.681.000
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	2.300.000.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	8.290.836.000
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	11.521.261.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.559.901.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	11.851.338.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	9.171.379.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	5.082.674.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.598.706.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	163.242.048.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.969.540.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	66.707.719.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.468.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	10.538.234.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.493.750.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	936.800.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	23.568.623.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.986.671.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	950.709.000
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	1.489.508.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	393.394.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	334.900.000
4.2.01.05	Dana Desa	110.910.140.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	110.910.140.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	110.910.140.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.068.372.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	57.000.000.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	57.000.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.500.000.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.500.000.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.000.000.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.000.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.000.000.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	4.068.372.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	4.068.372.000
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	4.068.372.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.965.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	34.965.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	34.965.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	34.965.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	34.965.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.170.671.349.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	770.936.371.903
5.1.01	Belanja Pegawai	496.809.159.174
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	323.408.950.886
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	250.098.467.607
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	227.704.194.533
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	22.394.273.074
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.691.372.691
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	21.306.611.491
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	384.761.200
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.932.551.955
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.932.551.955
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.667.144.933
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.667.144.933
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.245.433.641
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.980.959.641
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	264.474.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.803.209.595
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.499.577.595
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	303.632.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	335.748.986
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	325.316.986

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	10.432.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.951.408
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.880.408
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	71.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.753.970.070
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.500.000.000
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	253.970.070
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	469.100.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	458.300.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	10.800.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.405.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.375.000.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	30.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	112.933.206.388
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	101.832.600.392
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	101.832.600.392
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	10.538.234.000
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	10.538.234.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	562.371.996
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	562.371.996
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.136.692.900
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	602.101.590
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	602.101.590
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	313.166.610
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	313.166.610
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	10.914.634.700
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	10.914.634.700
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	306.790.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	18.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	279.790.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	9.000.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.366.110.000
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	48.930.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	48.930.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	72.800.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	72.800.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.190.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.190.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	107.496.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	107.496.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.375.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.375.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	896.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	896.000
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	57.000
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	57.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.957.184.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	25.000.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	6.080.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.104.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.916.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.564.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.564.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	169.810.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	169.810.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	170.534.000
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.100.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.100.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.700.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.700.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.958.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.958.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.249.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.249.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	509.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	509.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	18.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	18.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	706.800.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	226.800.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	226.800.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	480.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	480.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	34.086.865.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	34.086.865.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	34.086.865.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.988.856.729
5.1.02.01	Belanja Barang	32.524.702.125
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.520.952.125
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	68.365.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	44.670.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	862.000.700
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	564.380.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	996.785.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	93.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	724.057.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	474.961.000
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	900.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	6.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.111.677.325
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.054.574.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	63.460.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	8.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	675.318.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	364.665.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	231.526.750
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	386.100.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	7.100.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	18.100.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	113.740.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.422.688.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.686.100.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.180.660.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	47.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.519.725.850
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.006.630.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	14.400.000
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.200.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.202.182.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	104.421.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	225.360.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	82.000.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	694.300.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9.500.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	413.100.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	402.355.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	9.400.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	2.500.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	262.850.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	102.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	84.500.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	178.200.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.750.000
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	3.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	93.025.451.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	43.550.636.400
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.627.910.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.670.900.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	122.400.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	419.800.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	29.600.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	80.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	359.350.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	140.400.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.760.918.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	32.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.433.300.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	6.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	20.315.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.100.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	10.800.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	16.311.350.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.706.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	541.285.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25.200.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	14.400.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	22.000.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	7.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	110.600.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	5.000.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.666.900
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.552.359.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	59.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	14.500.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	16.680.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	1.015.400.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	517.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	461.850.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	233.320.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.248.132.500
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	271.950.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.153.980.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	14.900.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	158.400.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	4.105.070.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	250.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	37.969.600.000
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.000.000.000
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	35.216.000.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	606.600.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	63.000.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	78.000.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	6.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	246.800.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	216.800.000
5.1.02.02.03.0008	Belanja Sewa Tanah Basah	30.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.337.745.000
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	826.795.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	33.000.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	168.400.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	12.750.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	11.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	182.000.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.500.000
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	3.250.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	29.200.000
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	4.350.000
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	30.000.000
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	15.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	760.020.000
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	72.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	111.200.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	554.320.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	22.500.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.115.300.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	347.200.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	240.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.180.000.000
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	269.500.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	352.100.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	85.500.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.511.000.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	130.000.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	370.000.000
5.1.02.02.10.0002	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan	350.000.000
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	20.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.175.350.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.000.300.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	111.900.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	196.000.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.867.150.000
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	500.000.000
5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	500.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.884.131.700
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.605.338.200
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	300.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.890.270.200
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	97.000.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	297.400.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3.000.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	686.300.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	214.094.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	90.038.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	22.320.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	10.000.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	7.250.000
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	4.000.000
5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	5.000.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	5.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	76.006.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	108.950.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	66.250.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	11.160.000
5.1.02.03.02.0451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	5.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.020.313.500
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.610.789.500
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	680.000
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	14.400.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	1.760.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	35.000.000
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	599.444.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.258.480.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	250.000.000
5.1.02.03.04.0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	500.000.000
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	160.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	348.480.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	47.998.695.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.998.695.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.974.570.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	18.875.099.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.169.276.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.406.250.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	573.500.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.819.511.504
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	33.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.786.511.504

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.786.511.504
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	40.135.230.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	40.135.230.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	40.135.230.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.601.135.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.601.135.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.601.135.000
5.1.04	Belanja Subsidi	575.640.000
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	575.640.000
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	575.640.000
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	575.640.000
5.1.05	Belanja Hibah	25.671.316.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	19.175.143.552
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.091.143.552
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.185.547.552
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.905.596.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.105.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.105.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.979.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.979.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	5.833.620.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.833.620.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.833.620.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	662.552.448
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	662.552.448
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	662.552.448
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	891.400.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	771.400.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	12.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	12.000.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	759.400.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	759.400.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	120.000.000
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	120.000.000
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	120.000.000
5.2	BELANJA MODAL	215.145.279.097
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	500.000.000
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	500.000.000
5.2.01.01.02.0002	Belanja Modal Tanah Kering	500.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.672.731.646
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	5.615.724.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	500.000.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	500.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	5.115.724.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	10.050.000
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	12.000.000
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	5.082.674.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	11.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.141.186.538
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.141.186.538
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.797.986.538
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	893.200.000
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	450.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	98.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	98.000.000
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	88.000.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	10.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.043.384.600
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	996.629.600
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	8.500.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	988.129.600
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	911.155.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	550.155.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	3.500.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	26.000.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	110.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	220.000.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.500.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	135.600.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	3.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	30.500.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	17.100.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	85.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	265.839.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	195.839.000
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	8.000.000
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	14.500.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	173.339.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	70.000.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	70.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	27.925.540.408
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	18.695.000.000
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	495.000.000
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	13.512.446.037
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	3.487.553.963
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.200.000.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	9.230.540.408
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	9.230.540.408
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	650.300.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	650.000.000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	650.000.000
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	300.000
5.2.02.08.05.0002	Alat Kesehatan Kerja	300.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.329.057.100
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.689.572.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	200.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	118.636.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.370.936.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	639.485.100
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	639.485.100
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	35.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	35.000.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	35.000.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.800.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	1.800.000
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	1.800.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	27.500.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	27.500.000
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	27.500.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	225.900.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	225.900.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	225.900.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	313.500.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	313.500.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	313.500.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.474.269.426
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	38.459.269.426
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	38.459.269.426
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.330.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8.103.567.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.958.759.926
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	11.464.442.500
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.602.500.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	15.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	15.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	15.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	131.351.922.225
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	109.948.652.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	108.521.152.000
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	103.607.002.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	4.914.150.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.427.500.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.427.500.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	6.690.896.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.690.896.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	6.690.896.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	4.600.000.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	600.000.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	600.000.000
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	4.000.000.000
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	4.000.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	10.112.374.225
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	9.912.374.225
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	9.912.374.225

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	200.000.000
5.2.04.04.03.0001	Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah	200.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.146.355.800
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	150.000.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	150.000.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	110.000.000
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	40.000.000
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	800.000.000
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	800.000.000
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	800.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	196.355.800
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	196.355.800
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	46.355.800
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	150.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	18.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	18.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	18.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	18.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	18.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	166.589.698.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	400.000.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	150.000.000
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	150.000.000
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	150.000.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	250.000.000
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	250.000.000
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	250.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	166.189.698.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	166.189.698.000
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	55.279.558.000
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	55.279.558.000
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	110.910.140.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	110.910.140.000
	Jumlah Belanja	1.170.671.349.000
	Total Surplus/(Defisit)	0
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	0


Bupati Tana Toraja

THEOFILUS ALLORERUNG